

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salahsatu tujuan Negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan diantaranya dengan pembangunan ekonomi. Berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Menurut Silalahi (2014:208) kemiskinan merupakan kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (rumah), pendidikan serta kesehatan.

Kemiskinan merupakan masalah social yang selalu menjadi pembicaraan khusus diberbagai Negara terutama di Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia kemiskinan terjadi tidak hanya beberapa tahun saja, tetapi kemiskinan terjadi di Indonesia suda sejak Negara Indonesia berdiri kemiskinan sudah ada. Masalah kemiskinan yang berkelanjutan dapat berakibat pada satu masalah yang kompeleks. Contohnya, kemiskinan dapat berpengaruh dengan masalah kesehatan, pendidikan kriminalitas dan masi banyak lagi masalah-masalah yang lain.

Istilah kemiskinan muncul ketika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak dapat mencapai standar hidup tertentu. Ada beberapa jenis kemiskinan yaitu kemiskinan structural dan cultural. Kemiskinan structural terjadi karna struktur yang membuat sebagian masyarakat tertentu yang mendominasi sarana ekonomi, sosisal, politik dan budaya (lubis, 1986). Sedangkan kemiskinan

cultural disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri seperti, seperti perilaku hidup yang boros, kurangnya keterampilan kerja, dan tidak memiliki tabungan, serta memiliki sikap pasrah kepada lingkungan kemiskinan. Di Indonesia sendiri tingkat kemiskinan tidaklah sedikit yang disebabkan oleh perilaku hidup masyarakatnya, sehingga hal ini menyebabkan tingkat penduduk miskin setiap tahunnya meningkat. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat pengangguran tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai.

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama (Nuramin, 2011 dalam Rio Agam Saputra 2011: 4). Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*parttime*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. (Lincoln Arsyad, 1997: 70).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga merupakan salah satu daerah yang masih tergolong miskin. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yang terletak di dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan luas mencapai 20.153,20 km². Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.426,20 km² (76,50%) atau 2/3 dari luas NTB sedangkan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Pusat

pemerintahan Provinsi NTB berada di Kota Mataram Pulau Lombok. Kabupaten yang berada di Pulau Lombok adalah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Kabupaten yang berada di Pulau Sumbawa adalah Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima. (*Sumber: BPS, NTB Data dan Informasi Kemiskinan (2018)*)

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, membuat provinsi ini terus dilanda permasalahan kemiskinan. Dalam perbandingan rata-rata tingkat kemiskinan diseluruh provinsi di Indonesia tahun 2007-2011 memiliki rata-rata kemiskinan sebesar 23,73 %. Pada tahun 2013 presentasi penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat Mencapai 17,9% sedangkan kemiskinan di tingkat nasional sebesar 11,37% Kondisi alam di provinsi NTB yang tidak jarang mengalami kekeringan, rawan pangan menjadi permasalahan warga NTB. Kemiskinan, gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan. NTB memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar dan beragam, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah Propinsi NTB. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya investasi yang dilakukan.

Tingginya kemiskinan menunjukkan bahwa penanganan yang serius dari pemerintah maupun stakeholder sangat diperlukan untuk meminimalisir angka kemiskinan. Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanganan kemiskinan, sehingga untuk menanggulangi kemiskinan perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan, khususnya Nusa Tenggara Barat. Dimana sebagian besar kemiskinan yang ada di Provinsi Nusatenggara Barat dipengaruhi oleh jumlah PDRB, jumlah Penduduk dan jumlah pengangguran.

Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah pengangguran, terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2017."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perkembangan PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah pengangguran terhadap Jumlah Penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

C. Batasan masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat serta nilai dari orang, yang berupa obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel dependen dan variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari Kemiskinan, PDRB,

Jumlah Penduduk dan Pengangguran. Maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi tiga paktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin yakni PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Perkembangan PDRB, Jumlah PendudukJumlah pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Pendudukdan Tingkat Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang Ekonomi terutama dalam rangka mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Khususnya provinsi Nusatenggara Barat.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama yang terkait dengan variabel dalam penelitian ini serta diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang bisa mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemiskinan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat